BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 137/PM.00.02./K.SN-24/11/2022 20 November 2022
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan**
Pembentukan Badan Penyelenggara *Ad-Hoc*

Yth. **Ketua KPU Kota Parepare**
di-
tempat

1. Dasar Hukum
   1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad-Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
   6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/ K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pembentukan badan penyelenggara *Ad-Hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pemilihan umum tahun 2024, maka Bawaslu Kota Parepare mengimbau kepada KPU Kota Parepare, diantaranya :
   a. Aktif menginformasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan badan penyelenggara *Ad-Hoc* PPK;
   b. Seleksi penerimaan badan penyelenggara PPK dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
   c. Memastikan badan penyelenggara *Ad-Hoc* calon PPK :

1) Warga negara Indonesia;
2) Berusia paling rendah 17 tahun;
3) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5) tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
6) berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
7) mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
8) berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
9) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

d. Melaksanakan tahapan pembentukan badan penyelenggara *Ad-Hoc* pemilihan umum 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n KETUA,
Koordinator Divisi Hukum,
Pencegahan, Partisipasi
Masyarakat dan Hubungan
Masyarakat,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
KETUA

Nur Islah, SE., ME.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Ketua KPU Kota Parepare di Parepare
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Parepare